



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 34 TAHUN 2014

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(*KEY PERFORMANCE INDICATORS*)
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintahan, Bupati Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing – masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah (*Key Performance Indicators*) Kabupaten Ende Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATORS) PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi perangkat daerah.
5. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Sasaran Strategi adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur kurun waktu yang lebih pendek dari tujuannya.
7. Unit kerja mandiri adalah unit organisasi di lingkungan Instansi Pemerintah yang memiliki dan mengelolah sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Manfaat Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 – 2014 dan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 5

Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan :

- a. Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing – masing.
- b. Koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan administrasi pemerintah yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI ENDE
Muse
MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 24 Desember 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 34 TAHUN 2014
TANGGAL 24 DES. 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN : 2014

Misi 1. Mewujudkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Beragama

BIDANG : KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		U R A I A N	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya cakupan pembinaan kepada partai politik dan organisasi	1. Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang Undang-undang bidang politik. 2. Terlaksananya kegiatan Forum Diskusi Politik 3. Terlaksananya Penyusunan Data Base Parpol Ormas dan LSM 4. Terlaksananya Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2014 5. Terlaksananya Verifikasi bantuan keuangan kepada Partai Politik	75 orang 100 orang 20 buku 1 Tahun 16 Parpol	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
2.	Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	1. Persentase Penyelesaian/Pencegahan konflik horisontal 2. Terlaksananya Peningkatan kerja sama Tim Operasi Gabungan 3. Terhimpunnya informasi aktual secara dini 4. Tersedianya tenaga Linmas yang terlatih 5. Terlaksananya Apel Kesadaran setiap tanggal 17 dalam bulan 6. Adanya pemahaman tentang kerukunan antar umat beragama 7. Adanya pemahaman masyarakat tentang Pembauran Kebangsaan 8. Terciptanya situasi yang aman dan tertib dalam masyarakat 9. Terlaksananya Pengadaan perlengkapan pakaian Linmas/Hansi PAM Pileg dan Pilpres Tahun 2014	100% 26 orang 25 orang 286 orang 11 Bulan 150 orang 75 orang 89 orang 286 orang		1

BIDANG : PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		U R A I A N	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan dan Serta Pembentukan Kelembagaan Penanggulangan	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1. Pembentukan TSBD Desa Pora, Mausambi, Rindiwato, Mbuli Lo'o, Wolotopo, Bheramari 2. Pembinaan TSBD di Desa Waturaka, Wologai Tengah, Pemo dan Wiwipemo 3. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di tingkat SLTP dan SLTA Kecamatan Lio Timur, Nangapanda dan Kecamatan Ende Tengah 4. Pembinaan Forum Pengurangan Resiko Bencana 5. Pembinaan Desa/Kelurahan Model Tangguh Bencana 6. Sosialisasi Dala 7. Simulasi Protap Kebencanaan	420 orang 200 orang 120 orang 40 orang 40 orang 40 orang 120 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG : SOSIAL

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		U R A I A N	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya cakupan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1. Prosentase Penduduk Miskin yang terjangkau dalam Jaminan Kesejahteraan Penduduk Miskin (JPKM) 2. Pemenuhan terhadap sarana sosial Panti Jompo/Panti Rehabilitas dan Panti Sosial lainnya 3. Prosentase Penurunan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Soial (PMKS) 4. Prosentase Peningkatan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Soial (PMKS)	55% 31,73 % 14% 10,23 %	Dinas Sosial	
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Warga Miskin	1. Prosentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	50,19 %		

BIDANG : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		URAIAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Terkendalinya Angka Kelahiran	1. Menurunnya angka kelahiran 2. Tingkat prevalensi KKB aktif 3. Tingkat peran serta KB mandiri	4.439 orang 60% 10%	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
2.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Cakupan Pembinaan Kader KBKS	100% (84 orang)		

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN : 2014

Misi 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan
BIDANG : PENDIDIKAN

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		URATAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Terpenuhnya Pemerataan Kesempatan Belajar bagi Peserta didik di Usia Sekolah	1. Persentase angka Melek Huruf 2. Persentase angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 3. Persentase angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS 4. Persentase angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA 5. Persentase angka Murni (APM) SD/MI 6. Persentase angka Murni (APM) SMP/MTS 7. Persentase angka Murni (APM) SMA/SMK/MA 8. Persentase angka Putus Sekolah SD/MI 9. Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs 10. Persentase Angka Putus Sekolah SMA/Ma 11. Persentase angka Putus Sekolah SMK 12. Persentase Anak Usia Sekolah yang mengikuti PAUD	93,51% 103,31% 86,56% 80,98% 110% 69,51% 48,35% 0,69% 1,44% 0,24% 1,11% 74,1%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
2.	Meningkatnya Angka Kelulusan	1. Persentase angka kelulusan SD/MI 2. Persentase angka Kelulusan SMP/MTS 3. Persentase angka Kelulusan SMA/MA 4. Persentase angka Kelulusan SMK 5. Persentase Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS 6. Persentase Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTS ke SMA/MA/SMK 7. Tingkat Penyelesaian Sekolah SMP/MTS 8. Tingkat Penyelesaian Sekolah SMA/MA 9. Tingkat Penyelesaian Sekolah SMK 10. Persentase Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTS ke SMA/MA/SMK 11. Persentase angka Putus Sekolah yang Mengikuti Program Paket A 12. Persentase angka Putus Sekolah yang Mengikuti Program Paket B 13. Persentase angka Putus Sekolah yang Mengikuti Program Paket C	98,57% 85,75% 82,18% 93,17% 84,96% 90,94% 88,08% 89,87% 88,54% 90,94% 86,96% 84,7% 95,24%		

3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Ruang Kelas yang Layak : - SD/MI 8,08% - SMP/MTS 71,44% - SMA/MA 62,95% - SMK 70%		
4	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pendidik dan Manajemen Pendidikan	1. Persentase Guru Berkeahlian/Berkompeten (Per jenjang Pendidikan) - SD 2,91% - SMP 55,97% - SMA 75,65% - SMK 69,13% 2. Persentase Guru yang Lulus Sertifikasi (Per jenjang Pendidikan) - SD 2,91% - SMP 55,97% - SMA 75,65% - SMK 69,13% 3. Ketersediaan Tutor Paket A, B, dan C 97,56%		
5	Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	1. Persentase Pembinaan Cabang - cabang Olahraga 45% 2. Kualitas Olahraga Berprestasi 45% 3. % Kelompok Pemuda yang sudah di berdayakan 45%		

BIDANG : PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		URAIAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	1. Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan 2. Perbandingan judul buku yang tersedia sesuai kebutuhan 3. Perbandingan Jumlah Kunjungan dari Tahun Sebelumnya	26% 100% 196%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olaraga	
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pernantauan dan Pengawasan Pembangunan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	1. Terselamatnya/Tersimpannya Arsip yang telah diakuisisi	16,87%		

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN : 2014

Misi 3 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
 BIDANG : KESEHATAN

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		U R A I A N	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	1. Ratio ketersediaan tenaga bidan 2. Ratio ketersediaan tenaga perawat	7,19% 7,71%	Dinas Kesehatan	
2.	Meningkatnya Kualitas & Kuantitas Obat	1. Persentase penyediaan Obat & BHP di sarana kesehatan 2. Persentase pengawasan seluruh sarana peredaran obat	89,60% 100%		
3.	Meningkatnya Penduduk Miskin yang Masuk Program Jamkesmas	1. Persentase penduduk miskin yang terjangkau Jamkemas 2. Cakupan Pelayanan kesehatan dasar Masyarakat miskin 3. Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	95% 100% 100%		
4.	Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan	1. Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas 2. Ratio puskesmas terhadap jumlah penduduk 3. Persentase Penyediaan obat dan BHP di sarana kesehatan pemerintah	86,23% 11,49 Jiwa 87%		
5.	Meningkatnya Distribusi Makanan & Minuman yang memenuhi syarat Kesehatan	1. Persentase pengawasan industri makanan & minuman yang memenuhi syarat kesehatan	95%		
6.	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	1. Persentase Balita Gizi Buruk 2. Cakupan Pemberian Makan ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 3. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	0,61% 100% 100%		
7.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup	1. Persentase keluarga yang memiliki jamban 2. Persentase Desa Siaga Aktif	58,00% 75%		

1	2	3	4	5	6
8.	Meningkatnya Pencegahan & Pemberantasan Penyakit	1. Persentase penanganan seluruh kejadian Luar Biasa (KLB) 2. Persentase cakupan imunisasi (UCI) di seluruh desa/kelurahan 3. Penemuan pasien baru TB BTA (+) 4. Persentase angka kesembuhan TB Paru BTA + (positif) 5. Persentase penanganan kasus HIV yang ditemukan 6. Persentase penanganan kasus malaria 7. AFT Rate per 100.000 penduduk dibawah umur 15 tahun 8. Penemuan penderita Pneumonia Balita 9. Penderita DBD yang ditangani 10. Penemuan penderita diare	100% 95% 90% 94% 100% 100% <2/100.000 95% 100% 100%	Dinas Kesehatan	
9.	Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH)	1. Persentase umur harapan hidup	65,5%		
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 2. Kasus kematian ibu melahirkan 3. Cakupan ibu hamil melahirkan K4 4. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani 5. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 6. Angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 7. Cakupan pelayanan ibu nifas 8. Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani 9. Menurunnya angka kematian balita	10,76% 5 kasus 90% 80% 85% 94% 100% 100% 0,74 per		
11.	Perspektif Keuangan	1. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (SGR) 2. Cost Recovery Ratio 3. Tingkat Kemandirian Keuangan	19,43% 202,06% 40,01%		
12.	Perspektif Pelanggan Meningkatnya Jumlah Pasien	1. Tingkat Pertumbuhan Pasien 2. Cakupan Kunjungan Pasien Rawat Jalan 3. Cakupan Kunjungan/Hari Rawat Inap pasien 4. Cakupan Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit 5. Tingkat Pertumbuhan Kunjungan Pasien Rujukan 6. Tingkat Penurunan Keluhan Pasien	8% 12% 12% 22% 33%		

13. Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik	1. Tingkat Pertumbuhan Jumlah Resep yang dilayani Apotek 2. Tingkat Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 3. Tingkat Pertumbuhan Hasil Radiologi 4. Tingkat Pertumbuhan Pelaksanaan Operasi	53,76% 63,46% 47,87% 75,69%	
14. Terwujudnya Laporan Keuangan	1. Hasil Audit Atas Laporan Keuangan BLUD RSUD	WTP	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**TAHUN : 2014**

Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Rakyat
BIDANG : TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		URA I A N	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Tersedianya Tenaga Kerja yang Terampil dan Produktif serta Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	1. Jumlah tenaga kerja yang terlatih 2. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	87% 63%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	1. Persentase Perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) 2. Pelaksanaan undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang jamin sosial tenaga Kerja 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan keselamatan kesehatan Kerja (K3) 4. Pelaksanaan Undang-undang nomor 7 tahun 1961 tantang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan	32,35% 50,45% 44,65% 100%		
3.	Tertatanya Pemanfaatan Kawasan dan Pembinaan Transmigrasi	1. Luas kawasan hunian 2. Pemerataan penyebaran lokasi transmigrasi	83,9% 80%		

BIDANG : PERTANIAN DAN PERTEHAKAN

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		U R A I A N	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Hasil Pertanian	1. Jumlah kelompok pengelola pertanian 2. Jumlah data produk komoditas unggulan 3. Jumlah data statistik pertanian yang akurat 4. Persentase pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengoprasian Alisistan, pengolahan limbah menjadi pakan ternak serta pengolahan hasil pertanian 5. Jumlah sarana produksi (pupuk urea, organik, NPK, Phoska) 6. Jumlah pengembangan bibit unggul pertanian (padi sawah, kacang merah, sorgum) seluas masing 3 Ha 7. Jumlah kontribusi SKPD terhadap PAD 8. Persentase produksi padi/bahan utama lokal lainnya	16 Kelompok 4 Komoditi 21 Kec 100% (30 org)	Dinas Pertanian dan Perternakan	
2.	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Hasil Peternakan	1. Jumlah obat-obatan untuk penaggulangan wabah rabies sebanyak 300 dosis 2. Jumlah obat-obatan penanggulangan wabah antrax 5000 dosis 3. Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat peneriner/pada rumah potong hewan 4. Jumlah pelayanan penaggulangan penyakit hewan menular 5. Persentase peningkatan produksi hasil peternakan 6. Persentase kontribusi terhadap PAD	1 Paket 24 Ton 92,34% 100%		

BIDANG : PERIKANAN DAN KELAUTAN

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		URAIAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Meningkatnya Produktifitas Perikanan 2. Jumlah Luas Lahan Budi Daya rumput laut 3. Jumlah Luas Kolam dan Tambak 4. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD 5. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	43,65 % 2,55 % 0,88 % 0,12 % 7,80 %	Dinas Perikanan dan Kelautan	
2.	Meningkatnya Kesejateraan Nelayan	1. Persentase nelayan dan pembudidayaan dengan kepemilikan rumah layak huni 2. Persentase nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap 3. Persentase Nelayan dengan Pendapatan/bulan diatas UMR 4. Persentase pembudidaya dengan Pendapatan/bulan diatas UMR.	20,55% 20,83% 63,35% 22,78 %		

BIDANG : KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		U R A I A N	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	1. Perlindungan Hutan pada Kawasan Hutan Negara dalam Wilayah Kabupaten Ende	1. Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan pada kawasan hutan negara dalam wilayah Kabupaten Ende	10 Kelompok luas 74.317,54 ha	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
	2. Review Kawasan Hutan	1. Terlaksananya Review kawasan hutan pada 3 calon enclave dan 2 Kipk hutan 2. Terwujudnya kondisi hutan negara di Kabupaten Ende yang aman dari gangguan kerusakan khususnya oleh perilaku manusia berupa penebangan liar ilegal logging perambahan, okupasi, pembakaran lahan/hutan dan pengrusakan kawasan hutan tanpa ijin	3 enclave, kayu ilegal yang diamankan untuk negara dan lelang sebanyak 30 m ³ sensor/gergaji ranta yang ditahan proses hukum sebanyak 8 buah dengan 10 orang pelaku	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
	3. Peningkatan Hasil Produksi Hutan	1. Terciptanya rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kab. Ende melalui KBR	1 Tahun		
2.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1. Terlaksananya pelaksanaan kegiatan bulan menanam Nasional dan Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) Tingkat Kabupaten Ende	80.000 batang Mahoni 20.000 Cendana 12.000 Gaharu 8.000 Nara 5.000 Wala 50.000 Sengon 10.000 Jati lokal 7.500 Jati putih 10.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
3.	Pembuatan Embung Air	1. Terlaksananya pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan	1 unit		

	<p>1. Peningkatan Fungsi DAS (Optimalisasi Pembentukan KPH)</p> <p>2. Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Produksi</p> <p>4. Peningkatan Produksi Perkebunan</p>	<p>Air (embung dan sumur resapan)</p> <p>1. Terlaksananya pembuatan tanaman reboisasi hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan Jalan Produksi - Tersedianya Jalan Produksi - Dibangunnya Jalan Produksi 	<p>27 unit</p> <p>24 ha</p> <p>15 Km</p> <p>13 Desa</p>	

BIDANG : KETAHANAN PANGAN

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		URAIAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1. Jumlah ketersediaan lumbung pangan desa 2. Jumlah buku analisis dan pola konsumsi suplay pangan 3. Persentase ketersediaan pangan 4. Tingkat penanganan daerah rawan pangan 5. Angka Kecukupan Gizi (AKG)	4 unit 2 buku 87% 100% 2000 Energi KKL	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian	
2.	Menurunnya Jumlah Penduduk yang Mengkonsumsi Pangan Beras	1. Persentase masyarakat yang mengkonsumsi pangan beras 3 kali sehari	29,70%		

BIDANG : KOPERASI

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		URAIAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Kemandirian UMKM	1. Jumlah koperasi yang berbadan hukum 2. Jumlah koperasi aktif 3. Jumlah koperasi berkualitas 4. Jumlah UMKM yang dibina 4. Jumlah UMKM yang mandiri	115 kop/53,49% 95 kop/82,61% 70 Kop/73,68% 130 Kop/3,05% 93 Kop/61,54%	Dinas koperasi	

BIDANG : PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		URAIAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Peran Serta Perdagangan dan Perindustrian dalam Perekonomian Daerah	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 2. Kontribusi sektor perdagangan (khusus perijinan dan penerimaan lainnya) terhadap PAD 3. Produktifitas sektor perdagangan 4. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 5. Produktifitas sektor industri besar 6. Peningkatan sumber daya manusia (TPL)	30% 1% 3326126700,00% 2,19% 397,66 150,00%	Dinas Perindustrian dan perdagangan	
2.	Meningkatnya Daya Saing yang Berkelanjutan di Pasar Global Melalui Akses Pasar, Kemitraan Usaha Kecil, Menengah, dengan Perusahaan/Pedagang Besar	1. Kemitraan antara Bapak angkat dengan kelompok industri kecil 2. Kemitraan Perdagangan	300,00% 45,00%		
3.	Meningkatnya Tertib Ukur dan Terwujudnya Perlindungan Konsumen Serta Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri	1. Tingkat pengawasan terhadap UTPP	100%		
4.	Meningkatnya Daya Dukung Yang Tinggi Bagi Perkembangan Industri Kecil dan Pedagang Kecil Guna Mendukung Perekonomian Masyarakat	1. Penambahan jumlah industri kecil yang memanfaatkan potensi lokal 2. Penambahan jumlah perusahaan yang mempunyai SIUP	163,64% 12,48%		
5.	Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri	1. Jumlah jenis barang yang beredar sesuai standar (SNI)	100%		

BIDANG : PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		U R A I A N	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan, Energi dan Kelistrikan	1. Jumlah lokasi penambangan galian golongan C yang ditata 2. Persentase tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi pertambangan 3. Jumlah bangunan bak penurunan dan instalasi perpipaan 4. Jumlah lokasi survei dan pengukuran pengeboran geolistrik di wilayah pedesaan 5. Jumlah data potensi sumur explorasi panas bumi 6. Pengawasan, penertiban kegiatan pertambangan rakyat 7. Pengadaan pembangkit listrik tenaga surya 8. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD	3 Kecamatan 100% 2 paket/7 orang 5 titik/7 orang 21 Kecamatan 21 Kecamatan 2 Desa/60 unit 1,32%	Dinas Pertambangan dan Energi	

BIDANG : PENANAMAN MODAL

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		U R A I A N	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Strategi Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya buku potensi dan peluang investasi Kab. Ende 2. Tersedianya leaflet bahasa indonesia (peta potensi) 3. Tersedianya draft buku potensi 4. Terlaksananya keikutsertaan Kabupaten Ende dalam pameran investasi daerah secara nasional di Kabupaten Manggarai Barat 	100% (60 buku) 100% (1 paket) 2.500 lembar 1 Kali	Badan Penanaman Modal Daerah	
2.	Meningkatnya Fasilitas CSR dan Kerjasama Kemitraan di Bidang Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti kegiatan temu kemitraan usaha tingkat Propinsi 2. Terfasilitasinya pengajuan proposal CSR/PKBL kepada PT, Perum, Perseroan, BUMN yang ada di Kabupaten Ende 3. Terfasilitasinya pengajuan proposal CSR/PKBL kepada PT, Perum, Perseroan, BUMN yang ada di Kabupaten Ende 4. Kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat Prov/Nasional 	100% 100% 2.500 lembar 19 Perusahaan 1 Kali%		
3.	Tersusunnya Naskah Akademis Ranperda Tentang Penanaman Modal di Kab. Ende	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Naskah Akademis Ranperda tentang Penanaman Modal di Kabupaten Ende 2. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) 	1 Ranperda		
4.	Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya minat Investor/dunia usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Ende 	4 Kajian Komoditi		

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN : 2014

Misi 5 : Menumbuh kembangkan Budaya Lokal Untuk Mendukung Pariwisata

BIDANG : KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		URAIAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melestarikan Budaya	<p>1. Terlaksananya pembinaan dan pemberian bantuan alat musik dan asesoris kepada 10 sanggar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rewarangga Selatan 2. Paupire 3. Potulando 4. Wolojita 5. Desa Nggua (Ndona Timur) 6. Woloaro (Lio Timur) 7. Ambu Zozo (Nangapanda) 8. Ndoriwoy (Pulau Ende) 9. Ekolea (Wewaria) 10. Mase Mera (wolotopo Timur) 	<p>1 Paket</p>	Dinas Pariwisata	
2.	Meningkatnya Kualitas Usaha Pariwisata	<p>1. Terlaksananya kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Agro Wisata 2. Work Shop Pengelolaan wisata bahari 3. Pelatihan pengelolaan desa wisata 4. Pelatihan pengembangan souvenir 	<p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p>		

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN : 2014

Misi 6 : Meningkatnya Kesadaran Masyarakat di Bidang Hukum dan Penataan Birokrasi Menuju Tata Kepemerintahan Yang baik
 BIDANG : PEMERINTAHAN UMUM/OTONOMI DAERAH

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		URAIAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penyelesaian Produk Hukum	1. Persentase produk hukum yang diajukan diharapkan di proses dan diselesaikan seluruhnya	100%		
2.	Terwujudnya Kesadaran Masyarakat akan Hukum dan Produk Hukum	1. Tersebar luasnya produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan	5 Kecamatan		
3.	Terwujudnya Pengkajian dan Penyusunan Produk Hukum serta Pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	1. Tersusunnya produk hukum daerah yang telah dikaji dan disusun oleh tim	11 Ranperda		
4.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban bagi Aparatur maupun Masyarakat	1. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan aparatur	1 Kasus		
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Pemerintahan	1. Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi dengan baik 2. Kecamatan yang menyampaikan laporan pelaksanaan tepat waktu 3. Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat tepat waktu 4. Peringkat hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah (EPPD)	100% 100% 100% 100%		
3.	Penguatan Kelembagaan DPRD Kabupaten Ende	1. Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman, dan Ketrampilan 2. Terwujudnya aspirasi dan informasi dari publik (diskusi masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD) 3. Persentase kunjungan kerja DPRD ke Desa dan Kecamatan 4. Adanya laporan tertulis tentang adanya rapat Panmus, Pansus Komisi dan Gabungan Komisi di DPRD 5. Adanya penetapan keputusan/kebijakan pimpinan DPRD	7 Perda 100% 100% 100%		
			10 Keputusan		

		6. Meningkatnya wawasan pengetahuan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan	30 orang		
4.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan.	1. Persentase pelaksanaan pengawasan terhadap obyek pemeriksaan 2. Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	100% 100%		
5.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan, Penilaian dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan pengawasan secara efektif	100%		
6.	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	1. Persentase pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pengawasan (3 orang).	100%		

1	2	3	4	5	6
7.	Meningkatnya Kualitas Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase SKPD yang aktif memberikan informasi melalui teknologi informasi (memanfaatkan website) 2. Persentase ketersediaan sarana informasi berbasis ITE 3. Persentase cakupan masyarakat yang menerima informasi 4. Jumlah pengaduan yang masuk dan diselesaikan (dijawab) setiap tahun 	1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%	BKD	
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase SKPD yang memiliki standar pelayanan minimal 2. Persentase penyelesaian LAKIP Kabupaten Ende tahun 2013 tepat waktu 	5 buah 100%		
9.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Perencana yang handal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Presentasi perencana yang mengikuti pendidikan/pelatihan fungsional perencana 	2 orang		
10.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen perencana pembangunan yang diper - syaratkan dalam peraturan perundang-undangan 	450/100%		
11.	Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektor yang Harmonis dengan Lembaga Pemerintah, Swasta, serta Lembaga - lembaga Donatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dokumen perencanaan diselesaikan tepat waktu 	100%		
12.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah 2. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) 	100% 100%		
13.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pelaksanaan pengawasan terhadap obyek pemeriksaan 2. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan tindak lanjut hasil pemeriksaan 	100% 100%		
14.	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pengawasan (10 orang) 	100%		
15.	Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan pendapatan daerah (pajak dan retrebusi) 	100%		
16.	Terwujudnya Efektifitas Pengguna Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu 2. Berkurangnya jumlah temuan audit oleh BPKP 	75 SKPD 9 SKPD		

17.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kecamatan yang dijadikan sebagai lokasi kegiatan sosialisasi 2. Terlaksananya penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 3. Ketepatan penerbitan dokumen dan laporan 	11 Kecamatan	12 Bulan	100%	5 orang
18.	Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 				
19.	Terwujudnya Data Pendukung (Kenaikan Pangkat, Berkala, Impasing, Pensiun, Karis/Karsu, Taspen, Karpeg yang dikelola secara baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kenaikan pangkat yang tepat waktu 2. Jumlah pengurusan pensiun tepat waktu 3. Jumlah pengurusan karis karsu PNS tepat waktu 	1.400 orang 85 orang 340 orang			
20.	Pemenuhan Kebutuhan dan Tingkat Kompetensi SDM dalam Penyelenggaraan Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase struktur jabatan yang terisi 2. Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (5 orang) 3. Persentase CPNSD yang telah mengikuti diklat prajabatan 	500 orang 100%	194 orang		
21.	Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase struktur jabatan yang terisi 2. Persentase pegawai sesuai kebutuhan riil 3. Persentase jumlah aparatur yang melaksanakan tugas belajar, ijin belajar dan ikatan dinas 4. Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 5. Jumlah pelaksanaan seleksi penerimaan pra IPDN 	500 orang 200 orang 17 orang 5 orang 20 orang			

BIDANG : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA			KET
			URAIAN	TARGET	5	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya kepemilikan KTP 2. Meningkatnya persentase kepemilikan akta kenal lahir per 1000 penduduk 3. Tersedianya akta perkawinan 4. Meningkatnya permohonan pembuatan dokumen kependudukan oleh masyarakat 	90% 60% 64% 90%	Dinas Pendagtaran Penduduk dan Catatan Sipil		

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN : 2014

Misi 7 : Meningkatkan Pembangunan Instruktur dan Lingkungan Hidup

BIDANG : PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		U R A I A N	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Konstruksi Jalan	1. Peningkatan jalan dalam kota Ende	2,23%		
2.	Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Pengairan Baik Kualitas Maupun Kuantitas	1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih - Rawa dan jaringan pengairan lainnya kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum (Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Kanganara Desa Watunggere Kecamatan Detukell)	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum	

BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		U R A I A N	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Cakupan pengawas terhadap pelaksanaan AMDAL 2. Persentase pelaksanaan penetapan status mutu air	85% 11,11%		
2.	Meningkatkan Kualitas Pertamanan	1. Persentase penanganan taman kota/kecamatan 2. Persentase green spaces yang terawat diperkotaan 3. Luas ruang terbuka hijau publik dari luas wilayah kota persatuan penduduk	100% 96% 20%	Badan Lingkungan Hidup Daerah	
3.	Meningkatnya Kualitas Persampahan	1. Persentase penanganan sampah rumah tangga 2. Persentase volume sampah yang diolah dan dimusnahkan 3. Rasio tempat pembuangan sampah sementara (TPS)	67,46% 59% 53,77%		
4.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	1. Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang terselesaikan LAKIP, LKPJ, RKT dan Penetapan Kinerja	5 Buku		

BIDANG :PERHUBUNGAN

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		U R A I A N	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Jumlah Pelayanan di Bidang Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu penyelesaian izin kendaraan bermotor (KIR) 2. Persentase penertiban administrasi kendaraan bermotor 3. Persentase pengawasan dan pengendalian kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor 	<ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 	Dinas Perhubungan	
2.	Tercukupinya Sarana dan Prasarana Kenyamanan Lalu Lintas dan Angkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu - rambu lalu lintas 2. Terpenuhinya kebutuhan terminal penumpang dan barang 3. Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas 	<ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 		

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN : 2014

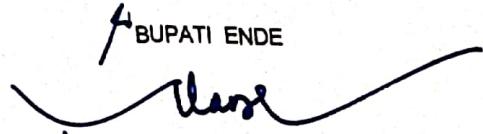
Misi 8 : Meningkatkan Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan

BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		U R A I A N	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Pedesaan dan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	1. Persentase LKMD yang menjalankan fungsi dengan baik 2. Persentase PKK yang aktif	70,89% 100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pem.Desa	
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdesaan	1. Persentase pembinaan kelompok siaga kesehatan dan posyandu di 21 kecamatan 2. Persentase peningkatan pengolahan administrasi desa 3. Jumlah pengembangan wilayah desa baru/defenitif 4. Persentase kantor desa yang layak	83,53% 87,41% 75,88% 75,88%		

BIDANG : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SASARAN UNIT ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENGUKUR / SUMBER DATA	KET
		URAIAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan • Terlaksananya sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan • Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) • Terlaksananya sosialisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 3. Persentase penguatan kelembagaan pengaruh utamaan gender & anak - Terbentuknya Forum Anak	100% 100% 100%	Bagian Pemberdayaan Perempuan	


 BUPATI ENDE
Uase
 Ir. MARSELINUS Y.W. PETU